

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Teknologi digital telah berkembang dan merubah cara kerja manusia dari konvensional menjadi digital. Pandemi COVID-19 juga telah merubah paradigma pemanfaatan teknologi digital dari sekedar alat kerja substitusi menjadi alat kerja sekunder bahkan primer. Dinamika kebutuhan teknologi digital juga memberikan kontribusi positif bagi mutu, kualitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan peningkatan kinerja. Digitalisasi atau transformasi digital dalam adaptasi kebiasaan baru juga telah menjadi solusi utama normalisasi kegiatan layaknya sebelum pandemi terjadi.

Transformasi digital sesungguhnya telah menjadi kebijakan dan strategi nasional dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Regulasi pengatur mekanisme transformasi digital tertuang dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional e-Government. Pelaksanaannya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. BADIKLATLUH Kementerian Sosial melalui PUSDIKLAT KESOS (BADIKLATLUH, 2020), secara khusus menjelaskan tata laksana kerja melalui aturan terkait transformasi digital yang termaktub dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pelaksanaan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 selanjutnya diatur melalui Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024. Hadirnya regulasi terkait transformasi digital memberikan pemahaman akan pentingnya digitalisasi untuk menghadapi paradigma kerja sesuai tuntutan jaman.

Transformasi digital, sesuai regulasi di Indonesia, juga menyangkut tentang big data. Big data yang bersumber dari Kementerian-Lembaga (K/L) atau Dinas dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik. DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu bentuk dari Big data. DTKS, sesuai pidato Presiden Joko Widodo pada Rapat Paripurna DPR RI masa sidang Tahun 2020-2021 di Gedung MPR/DPR menyatakan “Pemerintah akan melakukan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial serta penguatan monitoring dan evaluasi. Reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap ini sangat penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrim tahun 2024” (Bappenas, 2020). Pernyataan presiden ini memberikan ketegasan posisi big data melalui DTKS sebagai salah satu prioritas isu di Indonesia, terutama dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

DTKS sebagai upaya mengeskalisasi pelayanan publik telah dikerjakan secara sistematis di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Pasuruan. Penyelenggaraan pengumpulan DTKS di Kabupaten Pasuruan memiliki kompleksitas dalam pelaksanaannya. Indikasi yang ditemui antara lain, penguasaan teknologi dalam tata kerja oleh operator DTKS di tingkat Desa atau Kecamatan yang mempengaruhi kinerja; Peran pimpinan dalam melaksanakan fungsi kepemimpinan; Rendahnya capaian yang mempengaruhi kepuasan kerja; Dan sistem informasi manajemen yang kurang memadai.

Indikasi yang ditemukan pada pelaksanaan penyelenggaraan DTKS di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya memiliki telaah ilmiah yang dapat didefinisikan. Lemahnya penguasaan teknologi berdampak pada kinerja memberikan pemahaman bahwa kinerja memerlukan suatu kesepahaman pada individu atau kelompok untuk menghasilkan out put dan out come sesuai tujuan kerja, rencana, dan atau standar yang telah disepakati. Pemahaman ini sesuai dengan definisi kinerja yang disampaikan Wibowo (2015), kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil terbaik dari organisasi, kelompok, dan individu melalui pemahaman dan penjelasan kinerja dalam suatu kerangka kerja tujuan terencana, standart, dan persyaratan atribut atau kompensasi yang disetujui bersama.

Peran pimpinan dalam melaksanakan fungsi kepemimpinan dapat dipahami bahwa cara pimpinan dalam memberikan pengaruh agar terwujud produktifitas sesuai tujuan masih lemah. Indikasinya disebabkan kurangnya kecakapan pimpinan dalam memahami dan menguasai sistem informasi yang menyebabkan gagalnya fungsi kepemimpinan. Keadaan ini mengakibatkan fungsi dan peran kepemimpinan tidak tercapai. Pemahaman ini merujuk pada definisi kepemimpinan menurut Hasibuan (2009), kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku para bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan perusahaan.

Kepuasan kerja yang dirasakan operator DTKS di Kabupaten Pasuruan merupakan dampak atas rendahnya hasil kinerja. Indikasi kepuasan kerja pada penyelenggaraan DTKS disebabkan faktor buruknya pelayanan dan ketidakmampuan memecahkan masalah terkait data. Faktor-faktor yang dirasakan dan dihadapi langsung oleh operator DTKS menyebabkan rendahnya penghargaan yang diterima dibanding harapan yang diyakini. Robbins & Judge (2013) secara rinci menjelaskan bahwa kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima.

Indikasi yang menjadi *point of view* dalam penyelenggaraan DTKS di Kabupaten Pasuruan adalah sistem informasi manajemen. Penyelenggaraan DTKS yang berhubungan

dengan teknologi informasi pasti memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung sistem informasi manajemen. Ketersediaan *software*, *brainware*, dan *hardware* merupakan komponen yang harus diperhatikan. Namun, kelayakan sistem informasi manajemen untuk menyelenggarakan DTKS di Kabupaten Pasuruan belum memadai. Hal ini mengakibatkan sistem informasi manajemen tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sistem informasi manajemen secara deskriptif dijelaskan oleh Laudon & Laudon (2008) sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan (atau mendapatkan), memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam organisasi.

Deskripsi masalah di atas, memberikan pemahaman bahwa adanya ketimpangan antara tujuan penyelenggaraan big data melalui DTKS dengan pelaksanaan penyelenggaraan DTKS di akar rumput, terutama di Kabupaten Pasuruan. DTKS menjadi kekuatan sumber data dalam penyelenggaraan kegiatan sosial terutama untuk pengentasan kemiskinan. Namun, pelaksanaan di akar rumput masih menghadapi masalah untuk memahami sistem informasi manajemen. Kekuatan DTKS adalah data yang diperoleh oleh operator pelaksana DTKS di Desa atau Kecamatan, akan menjadi bola salju masalah apabila data yang dimasukkan tidak sesuai rencana, standar dan tujuan yang disepakati. Menelaah dari masalah di atas maka penelitian ini dimaksudkan mencari pemecahan masalah dari pelaksanaan penyelenggaraan DTKS, karena kunci data adalah pada penyediaan data primer. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh kepuasan kerja, kepemimpinan dan sistem informasi manajemen terhadap kinerja sebagai pemutakhiran dan pembanding hasil penelitian terdahulu terhadap pengaruh yang dihasilkan secara parsial.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Merujuk latar belakang di atas, rumusan masalah dapat ditentukan sebagai berikut,

1. Apakah ada pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)?
2. Apakah ada pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)?
3. Apakah ada pengaruh sistem informasi manajemen terhadap kinerja operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut,

1. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)?

2. Menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)?
3. Menganalisis pengaruh sistem informasi manajemen terhadap kinerja operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain,

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pemahaman konseptual dan mampu menjabarkan permasalahan terkait kepuasan kerja, kepemimpinan, dan sistem informasi manajemen terhadap kinerja. Penelitian ini juga bertujuan memberikan informasi terkait kepuasan kerja, kepemimpinan, dan sistem informasi manajemen terhadap kinerja terutama dalam mekanisme pendekatan solutif dalam rangka pemanfaatan transformasi digital, organisasi digital, dan menghadapi adaptasi kebiasaan baru.

2. Manfaat Praktis

Penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan monitoring kinerja operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam bentuk masukan, penilaian, intervensi, dan atau audit.